



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SEKRETARIAT KABINET

**SEKRETARIAT KABINET
2021**



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SEKRETARIAT KABINET

SEKRETARIAT KABINET

2021



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

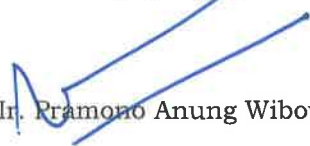
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 04 Januari 2021
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia


Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT KABINET

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan	91 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti	91 Persen
		Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti	91 Persen
3	Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	91 Persen
		Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan	100 Persen
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase tingkat kepuasan K/L (instansi pengusul) atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir	92 Persen
		Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah	90 Persen
		Indeks Reformasi Birokrasi	A (81,40)
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan	WTP
		Persentase tingkat kepuasan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet	91 Persen

	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	Rp37.451.201.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp302.303.941.000,-
	Total Anggaran	Rp339.755.142.000,-

Jakarta, 04 Januari 2021
 Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Rhamono Anung Wibowo, M.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratih Nurdianti, S.H., LL.M.
Jabatan : Wakil Sekretaris Kabinet Wakil Sekretaris Kabinet

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet

Pihak Pertama,
Wakil Sekretaris Kabinet Wakil Sekretaris Kabinet

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Ratih Nurdianti, S.H., LL.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
WAKIL SEKRETARIS KABINET**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang ditindaklanjuti	100 Persen
		Persentase Arahan Wakil Sekretaris Kabinet pada Surat atas Pelaksanaan Tugas Deputy, Staf Ahli, dan Staf Khusus di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang ditindaklanjuti	100 Persen
		Persentase Arahan Wakil Sekretaris Kabinet pada Memorandum atas Pelaksanaan Tugas Deputy, Staf Ahli, dan Staf Khusus di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang ditindaklanjuti	100 Persen
		Persentase Rekomendasi Kebijakan terkait Masalah-masalah Strategis Berdasarkan Penugasan dan Arahan Sekretaris Kabinet dan/atau Inisiatif Wakil Sekretaris Kabinet yang dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Pihak Pertama,
Wakil Sekretaris Kabinet Wakil Sekretaris Kabinet

Ratih Nurdianti, S.H., LL.M.

KEDEPUTIAN BIDANG
POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet

Pihak Pertama,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.


Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dimanfaatkan	91 Persen
		2. Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti	91 Persen
		4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti	91 Persen

	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp2.150.192.000,-
2.	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp1.449.808.000,-
3.	Penyelenggaraan layanan Fasilitas Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp500.000.000,-
	Total Anggaran	Rp4.100.000.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan


Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam
Negeri

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		2. Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | Rekomendasi kebijakan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri | Rp550.268.000,- |
|----|---|-----------------|

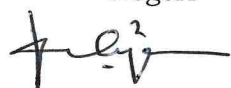
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri | Rp349.732.000,- |
|----|---|-----------------|

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan


Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam
Negeri


Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan


Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, dan Aparatur Negara,


Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN APARATUR NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		2. Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Rekomendasi kebijakan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara | Rp441.917.000,- |
|--|-----------------|

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara | Rp458.083.000,- |
|--|-----------------|

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, dan Aparatur Negara,


Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.


Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Johar Arifin, S.IP., M.P.M.

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Hubungan
Internasional

Dr. Johar Arifin, S.IP., M.P.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		2. Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional | Rp592.432.000,- |
|---|-----------------|

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional | Rp307.568.000,- |
|---|-----------------|

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan


Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hubungan
Internasional


Dr. Johar Arifin, S.IP., M.P.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M., M.H.

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

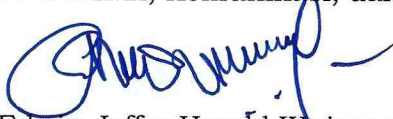
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan


Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Pertahanan,
Keamanan, Komunikasi, dan Informatika


Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M.,
M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		2. Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	1. Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	91 Persen
		2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	70 Persen
		3. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	91 Persen
		4. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	B

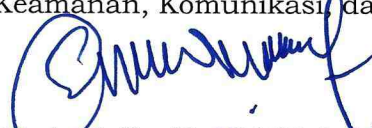
Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp565.575.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	
1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp334.425.000,-
Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	
1. Layanan penyusunan dokumen program dan anggaran Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp23.508.000,-
2. Layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Rp452.984.000,-
3. Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp23.508.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan



Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pertahanan,
Keamanan, Komunikasi dan Informatika



Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M.,
M.H.

KEDEPUTIAN BIDANG PEREKONOMIAN



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.
Jabatan : Deputy Bidang Perekonomian

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Deputy Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan	91 Persen
		Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	91 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian Keamanan yang ditindaklanjuti	91 Persen

Kegiatan	Anggaran
1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian	Rp2.159.793.000,-
2. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian	Rp1.440.207.000,-
3. Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp500.000.000,-
Total Anggaran	Rp4.100.000.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.
Jabatan : Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.
Jabatan : Deputy Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro,
Perencanaan Pembangunan, dan
Pengembangan Iklim Usaha

Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG EKONOMI MAKRO, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN
PENGEMBANGAN IKLIM USAHA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian	
Rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro,	
1. Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	Rp441.910.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian	
Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di	
1. bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	Rp458.090.000,-
Total Anggaran	Rp900.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian



Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,
Perencanaan Pembangunan, dan
Pengembangan Iklim Usaha



Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jabatan : Deputy Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Pengembangan Usaha
dan Wilayah

Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN WILAYAH

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian	
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Rp507.107.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian	
1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Rp392.893.000,-
Total Anggaran	Rp900.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian



Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha
dan Wilayah



Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Kurniawan, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jabatan : Deputy Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Perdagangan,
Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

Agus Kurniawan, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN
KETENAGAKERJAAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian	
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Rp499.670.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian	
1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Rp400.330.000,-
Total Anggaran	Rp900.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian



Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perdagangan,
Perindustrian, dan Ketenagakerjaan



Agus Kurniawan, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan
Pangan, Riset, dan Teknologi

Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu	91 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	70 Persen

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu	91 Persen
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian	B

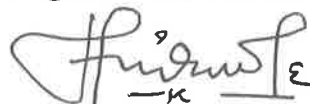
Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian	
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	Rp711.106.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian	
1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	Rp188.894.000,-
Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Pernerjemah	
1. Layanan penyusunan dokumen program dan anggaran Kedeputan Bidang Perekonomian	Rp66.144.000,-
2. Layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian	Rp381.890.000,-
3. Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputan Bidang Perekonomian	Rp51.966.000,-
Total Anggaran	Rp1.400.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian



Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi



Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.

KEDEPUTIAN BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jabatan : Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet

Pihak Pertama,
Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.


Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

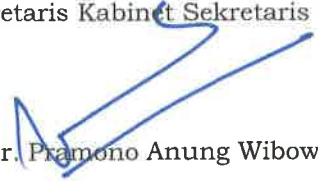
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dimanfaatkan	91 Persen
		Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	91 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	91 Persen

	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp1.975.494.000,-
2.	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp1.679.220.000,-
3.	Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp245.286.000,-
	Total Anggaran	Rp3.900.000.000,-

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet

Pihak Pertama,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Dr. Ir.  Pramono Anung Wibowo, M.M.


Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan

Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Rekomendasi kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan | Rp386.742.000,- |
|--|-----------------|

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan | Rp717.972.000,- |
|--|-----------------|

Total Anggaran	Rp1.104.714.000,-
----------------	-------------------

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan



Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan



Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Supriyadi, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan,
Pemuda, dan Olahraga

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Teguh Supriyadi, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA, KESEHATAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disetujui oleh Sekretraris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Rekomendasi kebijakan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga | Rp688.977.000,- |
|---|-----------------|

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga | Rp161.023.000,- |
|---|-----------------|

Total Anggaran	Rp850.000.000,-
----------------	-----------------

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan



Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan,
Pemuda, dan Olahraga



Teguh Supriyadi, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan,
Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG SOSIAL, KEBENCANAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Rp565.217.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di	
1. bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Rp284.783.000,-
Total Anggaran	Rp850.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan



Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan,
Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak



Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asri Ernawati, S.H., M.H.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

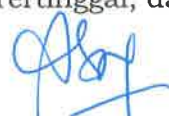
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
---	--


Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.


Asri Ernawati, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	91 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	70 Persen

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	91 Persen
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	C

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. Rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Rp334.558.000,-

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Rp515.442.000,-

Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Pernerjemah

1. Layanan penyusunan dokumen program dan anggaran Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp22.582.000,-
2. Layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp82.800.000,-
3. Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp139.904.000,-

Total Anggaran Rp1.095.286.000,-

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa,
Kebudayaan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi


Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.


Asri Ernawati, S.H., M.H.

KEDEPUTIAN BIDANG
KEMARITIMAN DAN
INVESTASI



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.
Jabatan : Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet

Pihak Pertama,
Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang dimanfaatkan	91 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti	91 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti	91 Persen

Kegiatan	Anggaran
1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp2.091.567.000,-
2. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp1.107.327.000,-
3. Penyelenggaraan layanan Fasilitas Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp901.106.000,-
Total Anggaran	Rp4.100.000.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diana Irawati, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jabatan : Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Kelautan, Perikanan,
dan Kehutanan

Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

Diana Irawati, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Rekomendasi kebijakan di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan | Rp544.029.000,- |
|----|--|-----------------|

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan | Rp255.971.000,- |
|----|--|-----------------|

Total Anggaran	Rp800.000.000,-
----------------	-----------------

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan,
dan Kehutanan


Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.


Diana Irawati, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Troeno Marayoga, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral
dan Lingkungan Hidup

Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

Troeno Marayoga, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP

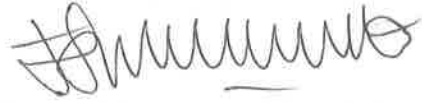
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Rp397.660.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi	
1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Rp401.234.000,-
Total Anggaran	Rp798.894.000,-

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral
dan Lingkungan Hidup



Troeno Marayoga, S.H., LL.M.

Pihak Kedua,

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi



Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hennie Ambar Susilowati, S.H.

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jabatan : Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Perhubungan dan
Pekerjaan Umum


Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.


Hennie Ambar Susilowati, S.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN DAN PEKERJAAN UMUM

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi

1. Rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Rp650.998.000,-

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi

1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

Rp149.002.000,-

Total Anggaran

Rp800.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi


Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan
Pekerjaan Umum


Hennie Ambar Susilowati, S.H.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jabatan : Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Penanaman Modal
dan Kepariwisata


Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.


Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANAMAN MODAL DAN KEPARIWISATAAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan Investasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan ke deputian bidang kemaritiman dan investasi yang disampaikan secara tepat waktu	91 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan ke deputian bidang kemaritiman dan investasi	70 Persen

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan ke deputian bidang kemaritiman dan investasi yang disampaikan secara tepat waktu	91 Persen
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan ke deputian bidang kemaritiman dan investasi	B (8 kali revisi)

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi

1. Rekomendasi kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan Rp498.880.000,-

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi

1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan Rp301.120.000,-

Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah

1. Layanan penyusunan dokumen program dan anggaran Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi Rp239.049.000,-
- Layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi Rp555.751.000,-
3. Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi Rp106.306.000,-

Total Anggaran

Rp1.701.106.000,-

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan

Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.

KEDEPUTIAN BIDANG
DUKUNGAN KERJA
KABINET



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.
Jabatan : Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet

Pihak Pertama,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan persidangan kabinet, naskah kepresidenan, dan dokumen terjemahan yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	91 Persen
		Persentase naskah kepresidenan yang disampaikan kepada Presiden RI	100 Persen
		Persentase dokumen terjemahan yang tidak mendapatkan komplain dari stakeholder	100 Persen
2	Terwujudnya kelancaran tugas, transparansi, dan akuntabilitas Sekretariat Kabinet	Persentase tingkat kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan melalui website dan media sosial	91 Persen
		Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan	91 Persen

Kegiatan	Anggaran
1. Penyiapan Naskah Kepresidenan dan Penerjemahan	Rp828.750.000,-
2. Penyelenggaraan dan pelaporan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Rp6.452.248.000,-
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik serta Keprotokolan	Rp2.762.500.000,-
4. Penyelenggaraan layanan Fasilitas Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp947.552.000,-
Total Anggaran	Rp10.991.050.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet

Dr. Ir. Prampno Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum., LL.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan
Persidangan

Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum.,
LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya persidangan kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet	91 Persen
		Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet	91 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyelenggaraan dan pelaporan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

1. Layanan pelaksanaan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya

Rp4.467.300.000,-

Total Anggaran

Rp4.467.300.000,-

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan
Persidangan



Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.



Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum.,
LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heru Priyantono, S.H., M.H.

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Pelaporan Persidangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Jabatan : Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Pelaporan
Persidangan

Heru Priyantono, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG PELAPORAN PERSIDANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya persidangan kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap dokumen hasil-hasil sidang kabinet	91 Persen
		Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan permohonan salinan risalah Sidang Kabinet	91 Persen
		Persentase Arahan Presiden (APRES) pada sidang kabinet yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden yang disampaikan kepada Pejabat Eselon I di Sekretariat Kabinet	100 Persen
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang disampaikan secara tepat waktu	91 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet	70 Persen
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang disampaikan secara tepat waktu	91 Persen
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet	B

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan dan pelaporan sidang kabinet/ratas/ pertemuan lainnya yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	
1. Layanan pelaporan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya	Rp1.984.948.000,-
Penyelenggaraan layanan Fasilitas Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	
1. Layanan penyusunan dokumen program dan anggaran Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Rp198.110.000,-
2. Layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Rp527.332.000,-
3. Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Rp222.110.000,-
Total Anggaran	Rp2.932.500.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet



Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pelaporan
Persidangan



Heru Priyantono, S.H., M.H.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Said Muhidin, S.H., M.H

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Jabatan : Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Hubungan
Kemasyarakatan dan Protokol

Said Muhidin, S.H., M.H

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KEMASYARAKATAN DAN PROTOKOL

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan Sekretariat Kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet	91 Persen
		Jumlah Laporan Layanan Protokoler yang dilaksanakan secara tepat waktu	12 Laporan

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik serta Keprotokolan

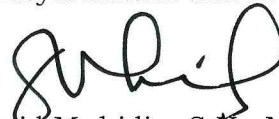
- | | |
|---|-------------------|
| 1. Layanan kehumasan tentang kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet | Rp1.838.142.000,- |
| 2. Layanan protokoler | Rp924.358.000,- |
| Total Anggaran | Rp2.762.500.000,- |

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet



Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hubungan
Kemasyarakatan dan Protokol



Said Muhidin, S.H., M.H



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuyu Mulyani, S.IP., M.A.
Jabatan : Asisten Deputy Bidang Naskah dan Penerjemahan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.
Jabatan : Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Naskah dan
Penerjemahan

Yuyu Mulyani, S.IP., M.A.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG NASKAH DAN PENERJEMAHAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Naskah Kepresidenan yang berkualitas	Persentase Naskah Kepresidenan yang disampaikan secara tepat waktu	100 Persen
2	Terwujudnya Dokumen Terjemahan yang berkualitas	Persentase penyelesaian Dokumen Terjemahan yang dipublikasikan di web resmi Sekretariat Kabinet	100 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyiapan Naskah Kepresidenan dan Penerjemahan

1. Naskah kepresidenan	Rp506.713.000,-
2. Dokumen terjemahan	Rp322.037.000,-
Total Anggaran	Rp828.750.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet



Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Naskah dan
Penerjemahan



Yuyu Mulyani, S.IP., M.A.

KEDEPUTIAN BIDANG ADMINISTRASI



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.
Jabatan : Deputy Bidang Administrasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Deputy Bidang Administrasi

Farid Utomo, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

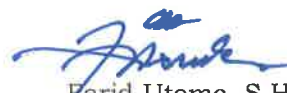
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara akurat	97 Persen
2	Terwujudnya layanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah yang berkualitas	Persentase rekomendasi penilaian pejabat Fungsional Penerjemah yang diselesaikan secara akurat	100 Persen
		Tingkat kepuasan peserta pendidikan dan pelatihan	100 Persen
3	Terwujudnya kelancaran tugas, transparansi, dan akuntabilitas Sekretariat Kabinet	Persentase kepuasan terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet	81 Persen
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet	WTP
		Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kabinet	BB (74)
		Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet	A (81,40)
		Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet	85,50
		Nilai hasil monev keterbukaan informasi publik	Menuju Informatif (83)
		Indeks kematangan SPBE	2,75

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Rp194.379.600.000,-
2.	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan	Rp1.814.741.000,-
3.	Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Pelayanan Umum	Rp88.471.477.000,-
4.	Pengelolaan Kinerja Organisasi, Reformasi Birokrasi, dan Ketatausahaan	Rp3.399.800.000,-
	Total Anggaran	Rp288.065.618.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet ~~Sekretaris Kabinet~~

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Administrasi


Farid Utomo, S.H., M.H.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendri Daud, Ak., M.Si., C.A., CCSA.
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.
Jabatan : Deputy Bidang Administrasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi



Farid Utomo, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan



Hendri Daud, Ak., M.Si., C.A., CCSA.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	77 Persen
2	Meningkatnya kualitas manajemen keuangan	Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100 Persen
		Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Pembayaran yang diselesaikan secara akurat	95 Persen
3	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi	Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	85 Persen
		Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan revisi anggaran	80 Persen

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan

1. Layanan penyusunan Rencana Kerja K/L	Rp243.768.000,-
2. Layanan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L	Rp370.973.000,-
3. Layanan revisi anggaran	Rp176.421.000,-
4. Laporan Pemantauan dan Evaluasi	Rp423.579.000,-
5. Laporan keuangan	Rp300.000.000,-
6. Dokumen perbendaharaan	Rp300.000.000,-
Total Anggaran	Rp1.814.741.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi


Farid Utomo, S.H., M.H.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan


Hendri Daud, Ak., M.Si., C.A., CCSA.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratih Mayangsari, S.E., M.Si.

Jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.

Jabatan : Deputy Bidang Administrasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Administrasi

Farid Utomo, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Tata Laksana

Ratih Mayangsari, S.E., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara tepat waktu	80 Persen
2	Meningkatnya kualitas layanan manajemen sumber daya manusia	Persentase kepuasan layanan kepegawaian	70 Persen
		Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai	80 Persen
		Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai	80 Persen
3	Meningkatnya efektivitas layanan manajemen organisasi dan tata laksana	Persentase penilaian atas efektivitas kelembagaan	80 Persen
		Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana	80 Persen
		Persentase produk hukum yang diselesaikan secara tepat waktu	80 Persen
		Persentase kepuasan terhadap layanan bantuan hukum	70 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	
1. Rekrutmen dan pengangkatan pegawai	Rp.2.428.290.000,-
2. Administrasi kepegawaian	Rp.119.800.000,-
3. Pembinaan kepegawaian	Rp.611.889.000,-
4. Pengembangan pegawai	Rp.610.458.000,-
5. Pemantauan dan penilaian Kinerja pegawai	Rp.22.000,-
6. Penempatan/mutasi pegawai	Rp.46.526.000,-
7. Pemberhentian pegawai	Rp.22.000,-
8. Penyusunan laporan kepegawaian	Rp.22.000,-
9. Pengelolaan kelembagaan	Rp.4.995.000,-
10. Tatalaksana organisasi	Rp.4.140.000,-
11. Koordinasi kelembagaan	Rp.36.702.000,-
12. Gaji dan Tunjangan	Rp.168.353.570.000,-
Total Anggaran	Rp.172.216.436.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi



Farid Utomo, S.H., M.H.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Tata Laksana



Ratih Mayangsari, S.E., M.Si.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendry Prihandono, S.Kom., M.Kom.

Jabatan : Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.

Jabatan : Deputy Bidang Administrasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Administrasi

Farid Utomo, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan
Reformasi Birokrasi

Hendry Prihandono, S.Kom., M.Kom.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIRO AKUNTABILITAS KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Jumlah unit ke deputian yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori BB	5 Unit Kerja
		Persentase tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja	80 Persen
		Jumlah komponen penilaian reformasi birokrasi yang nilainya meningkat	6 Komponen
		Persentase tingkat pemanfaatan dokumen reformasi birokrasi	80 Persen
2	Terselenggaranya layanan persuratan serta ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase kepuasan layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan	80 Persen

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan Kinerja Organisasi, Reformasi Birokrasi, dan Ketatausahaan

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Perencanaan kinerja organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet | Rp103.490.000,- |
| 2. Pemantauan, pengukuran, dan pelaporan kinerja organisasi dan individu | Rp102.374.000,- |
| 3. Pengembangan sistem manajemen kinerja | Rp189.806.000,- |
| 4. Perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet | Rp165.970.000,- |
| 5. Pelaksanaan manajemen perubahan di lingkungan Sekretariat Kabinet | Rp148.450.000,- |
| 6. Pengkajian dan pengembangan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet | Rp81.250.000,- |
| 7. Dukungan pelayanan kunjungan kerja dan rapat/pertemuan pimpinan (Seskab, Waseskab, Depmin) | Rp2.260.000.000,- |
| 8. Dukungan pelayanan dan administrasi ketatausahaan dan persuratan | Rp348.460.000,- |
| Total Anggaran | Rp3.399.800.000,- |

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi

Pihak Pertama,
Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi



Farid Utomo, S.H., M.H.



Hendry Prihandono, S.Kom., M.Kom.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Suparti, M.AP.
Jabatan : Kepala Biro Umum

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.
Jabatan : Deputy Bidang Administrasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi

Farid Utomo, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Biro Umum

Dra. Suparti, M.AP.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIRO UMUM**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengadaan, Barang Milik Negara, Pemeliharaan, Perlengkapan dan Jamuan, serta Pelayanan Umum Lainnya di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan rencana pengadaan	95 Persen
		Persentase akurasi laporan Barang Milik Negara	100 Persen
		Persentase kepuasan terhadap layanan pengadaan, pengelolaan barang milik negara, pemeliharaan, perlengkapan dan jamuan, serta pelayanan umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Pelayanan Umum

1. Operasional Perkantoran	Rp49.840.751.000,-
2. Layanan Pengelolaan BMN	Rp12.463.871.000,-
3. Layanan kerumahtanggaan	Rp1.574.941.000,-
4. Layanan pengadaan kendaraan bermotor	Rp560.000.000,-
5. Layanan pengadaan peralatan dan mesin	Rp3.113.609.000,-
6. Layanan pengadaan fasilitas perkantoran	Rp10.332.055.000,-
7. Layanan Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	Rp10.586.250.000,-
Total Anggaran	Rp88.471.477.000,-

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi

Pihak Pertama,
Kepala Biro Umum



Farid Utomo, S.H., M.H.



Dra. Suparti, M.AP.

STAF AHLI



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M.
Jabatan : Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Politik dan Hukum

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet

Pihak Pertama,
Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Politik
dan Hukum

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
STAF AHLI BIDANG POLITIK DAN HUKUM

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya dukungan manajemen pimpinan oleh Staf Ahli Sekretariat Kabinet	Persentase rekomendasi Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	100 Persen

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan Kinerja Organisasi, Reformasi Birokrasi, dan Ketatausahaan

1. Penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan terkait isu strategis di bidang Politik dan Hukum

Rp200.000.000,-

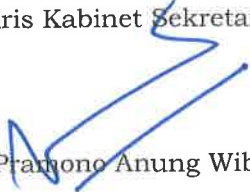
Total Anggaran

Rp200.000.000,-

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet ~~Sekretaris Kabinet~~

Pihak Pertama,
Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Politik dan Hukum

Dr. Ir.  Anung Wibowo, M.M.


Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mailani Amperawan, S.E., M.Si.

Jabatan : Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jabatan : Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet

Pihak Pertama,
Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Mailani Amperawan, S.E., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
STAF AHLI BIDANG PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya dukungan manajemen pimpinan oleh Staf Ahli Sekretariat Kabinet	Persentase rekomendasi Staf Ahli bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	100 Persen

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan Kinerja Organisasi, Reformasi Birokrasi, dan Ketatausahaan

- Penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan
 1. terkait isu strategis di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat

Rp200.000.000,-

Total Anggaran

Rp200.000.000,-

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
 Sekretaris Kabinet

Pihak Pertama,
 Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang
 Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Mailani Amperawan, S.E., M.Si.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Muis, S.Sos., M.P.M.
Jabatan : Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Pihak Pertama,
Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang
Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan
Internasional

Abdul Muis, S.Sos., M.P.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
STAF AHLI BIDANG KEMARITIMAN, INVESTASI, DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya dukungan manajemen pimpinan oleh Staf Ahli Sekretariat Kabinet	Persentase rekomendasi Staf Ahli bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	100 Persen

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan Kinerja Organisasi, Reformasi Birokrasi, dan Ketatausahaan

- Penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan
 1. terkait isu strategis di bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional

Rp200.000.000,-

Total Anggaran

Rp200.000.000,-

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Pertama,

Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang
 Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan
 Internasional



Abdul Muis, S.Sos., M.P.M.

Pihak Kedua,
 Sekretaris Kabinet

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.
Jabatan : Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Komunikasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet

Pihak Pertama,
Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang
Komunikasi

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
STAF AHLI BIDANG KOMUNIKASI**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya dukungan manajemen pimpinan oleh Staf Ahli Sekretariat Kabinet	Persentase rekomendasi Staf Ahli bidang Komunikasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	100 Persen

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan Kinerja Organisasi, Reformasi Birokrasi, dan Ketatausahaan

1. Penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan terkait isu strategis di bidang Komunikasi

Rp200.000.000,-

Total Anggaran

Rp200.000.000,-

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet ~~Sekretaris Kabinet~~

Pihak Pertama,
Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang
Komunikasi

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syafruddin, S.H., M.H.
Jabatan : Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Reformasi Birokrasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang
Reformasi Birokrasi

Syafruddin, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
STAF AHLI BIDANG REFORMASI BIROKRASI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya dukungan manajemen pimpinan oleh Staf Ahli Sekretariat Kabinet	Persentase rekomendasi Staf Ahli bidang Reformasi Birokrasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	100 Persen

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan Kinerja Organisasi, Reformasi Birokrasi, dan Ketatausahaan

1. Penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan terkait isu strategis di bidang Reformasi Birokrasi

Rp200.000.000,-

Total Anggaran

Rp200.000.000,-

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet

Pihak Pertama,
Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang
Reformasi Birokrasi

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Syafruddin, S.H., M.H.

INSPEKTORAT



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Bintoro, Ak.
Jabatan : Inspektur

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Pertama,
Inspektur

Agus Bintoro, Ak.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	90 Persen
		Jumlah unit ke deputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	5 Unit
		Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu	1 Laporan

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
1. Layanan penyusunan dokumen program dan anggaran Inspektorat	Rp.5.250.000,-
2. Layanan ketatausahaan dan dukungan administrasi serta teknis kegiatan pengawasan	Rp.9.450.000,-
3. Laporan audit dan hasil pengawasan internal	Rp.869.220.000,-
4. Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Inspektorat	Rp.3.080.000,-
Total Anggaran	Rp.887.000.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Pertama,
Inspektur

Agus Bintoro, Ak.

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulyati Kristina, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jabatan : Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

Yulyati Kristina, S.Sos., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya dukungan sistem informasi dan teknologi informasi, kearsipan dan perpustakaan, serta layanan data dan informasi yang berkualitas	Persentase kepuasan pengguna terhadap sistem dan teknologi informasi yang diimplementasikan	81 persen
		Jumlah indikator penilaian informasi publik yang nilainya meningkat	1 indikator
		Jumlah aspek penilaian SPBE yang nilainya meningkat	3 aspek
		Jumlah aspek pengelolaan arsip yang nilainya meningkat	4 aspek
		Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan	79 persen

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan Data, Teknologi Informasi, Kearsipan, dan Perpustakaan

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Layanan pengelolaan dokumen/arsip dan bahan pustaka | Rp127.000.000,- |
| 2. Layanan ketatausahaan Pusat Data dan Teknologi Informasi | Rp6.695.000,- |
| 3. Layanan teknologi, informasi, komunikasi | Rp5.642.055.000,- |
| Total Anggaran | Rp5.775.750.000,- |

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

Dr. Ir. Pramonono Anung Wibowo, M.M.

Yulyati Kristina, S.Sos., M.Si.

PUSAT PEMBINAAN PENERJEMAH



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Wahyu Utami, S.IP., M.E.
Jabatan : Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Sri Wahyu Utami, S.IP., M.E.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PUSAT PEMBINAAN PENERJEMAH

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi pembinaan pejabat fungsional penerjemah yang berkualitas	Persentase rekomendasi terkait penilaian, akreditasi, penetapan angka kredit, pengangkatan, kenaikan pangkat/golongan, pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali, serta pemberhentian dari jabatan yang diselesaikan secara tepat waktu	100 Persen
		Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan pelayanan Jabatan Fungsional Penerjemah yang ditindaklanjuti	100 Persen
2	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan penerjemahan yang berkualitas	Persentase kelulusan pejabat fungsional penerjemah pada pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	100 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi dilingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang disampaikan secara tepat waktu	100 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh Pusat Pembinaan Penerjemah	75 Persen
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran yang disampaikan secara tepat waktu	100 Persen
		Indeks revisi program dan anggaran Pusat Pembinaan Penerjemah	C (10 kali revisi)
		Persentase kepuasan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	75 Persen
		Tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem informasi Jabatan Fungsional Penerjemah	75 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah	
1. Rekomendasi pembinaan Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP)	Rp1.091.484.000,-
2. Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan penerjemahan	Rp842.266.000,-
Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	
1. Layanan penyusunan dokumen program dan anggaran Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp11.900.000,-
2. Layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp19.000.000,-
3. Layanan sistem informasi Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp70.729.000,-
4. Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp17.500.000,-
Total Anggaran	Rp2.052.879.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet

Dr. Ir. Prantono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah

Sri Wahyu Utami, S.IP., M.E.